

PELATIHAN LITERASI KEUANGAN DAN MANAJEMEN KEUANGAN KELUARGA DESA PARANGARGO

Ronny Hendra Hertanto¹, Ahmad Dahlan², Sri Hastuti^{3*}, Yosar Haritsar⁴, Tri Cicik Wijayanti⁵, Nindia Nur Arifiana Putri⁶, Yeni Tata Rini⁷, Dekki Umamur Rais⁸

¹²³⁶⁷Jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gajayana, Malang

⁴⁵Program Pasca Sarjana Magister Manajemen, Universitas Gajayana Malang

⁸Jurusan S1 Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

*Penulis Korespondensi: srihastuti@unigamalang.co.id

Abstract. *The low level of financial literacy among rural communities in Indonesia reflects a structural gap between national financial inclusion policies and the reality of household financial management at the village level, where the financial literacy index for rural groups only reaches 43.32 percent, women 47.02 percent, and farmers and farm laborers 37.91 percent according to the 2022 OJK National Survey on Financial Literacy and Inclusion. This community service program aims to enhance household financial management capacity through community-based financial literacy training in Parangargo Village, Wagir District, Malang Regency, targeting 40 active members of PKK and Posyandu cadres as participants. The implementation method employs a participatory-transformative approach in four sequential phases: needs assessment through in-depth interviews, training delivery in four sessions with a 30:70 ratio of lectures to participatory activities covering simple bookkeeping, short-term and long-term financial planning, introduction to savings instruments and micro-insurance, and strategies to avoid loan sharks, four-week post-training mentoring, and impact evaluation using mixed-methods. Evaluation results six weeks post-training indicate that 82.5 percent of participants adopted daily financial recording practices, 67.5 percent developed simple monthly budgets, 55 percent opened new savings accounts at formal financial institutions, and dependency on loan shark borrowing decreased from 35 percent to 7.5 percent, although structural barriers such as limited digital literacy and relational resistance from male family members were still found within the patriarchal cultural context. This program demonstrates that financial behavioral change among rural communities can occur when interventions are designed contextually and participatively by leveraging existing community structures, and confirms the importance of integrating financial education into village institutions such as PKK and Posyandu, providing diverse access channels to formal financial services according to community capacity, and continuous mentoring to ensure sustainability of learned financial practices.*

Keywords: *community-based training; family financial management; financial inclusion; financial literacy; women empowerment*

Abstrak. Rendahnya literasi keuangan masyarakat perdesaan di Indonesia mencerminkan kesenjangan struktural antara kebijakan inklusi keuangan nasional dan realitas pengelolaan keuangan rumah tangga di tingkat desa, di mana indeks literasi keuangan kelompok perdesaan hanya mencapai 43,32 persen, perempuan 47,02 persen, dan petani serta buruh tani 37,91 persen menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK tahun 2022. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan kapasitas manajemen keuangan keluarga melalui pelatihan literasi keuangan berbasis komunitas di Desa Parangargo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, yang menargetkan 40 anggota aktif PKK dan kader Posyandu sebagai peserta. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif-transformatif dalam empat fase berurutan yaitu penilaian kebutuhan melalui wawancara mendalam, pelaksanaan pelatihan dalam empat sesi dengan rasio ceramah dan aktivitas partisipatif 30:70 yang mencakup pembukuan sederhana, perencanaan keuangan jangka pendek dan panjang, pengenalan instrumen tabungan dan asuransi mikro serta strategi menghindari rentenir, pendampingan pasca-pelatihan selama empat minggu, dan evaluasi dampak menggunakan metode mixed-methods. Hasil evaluasi enam minggu pasca-pelatihan menunjukkan bahwa 82,5 persen peserta mengadopsi praktik pencatatan keuangan harian, 67,5 persen menyusun

anggaran bulanan sederhana, 55 persen membuka rekening tabungan baru di lembaga keuangan formal, dan terjadi penurunan ketergantungan pada pinjaman rentenir dari 35 persen menjadi 7,5 persen, meskipun hambatan struktural berupa keterbatasan literasi digital dan resistensi relasional dari anggota keluarga laki-laki masih ditemukan dalam konteks budaya patriarki. Program ini membuktikan bahwa perubahan perilaku finansial masyarakat perdesaan dapat terjadi ketika intervensi dirancang secara kontekstual dan partisipatif dengan memanfaatkan struktur komunitas yang sudah ada, serta mengonfirmasi pentingnya integrasi edukasi keuangan ke dalam kelembagaan desa seperti PKK dan Posyandu, penyediaan kanal akses layanan keuangan formal yang beragam sesuai kapasitas masyarakat, dan pendampingan berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan praktik keuangan yang telah dipelajari.

Kata kunci: inklusi keuangan; literasi keuangan; manajemen keuangan keluarga; pemberdayaan perempuan; pelatihan berbasis komunitas

1. LATAR BELAKANG

Rendahnya literasi keuangan masyarakat perdesaan di Indonesia bukan sekadar persoalan statistik, melainkan cerminan dari kesenjangan struktural yang bertahan lama antara kebijakan keuangan inklusif di tingkat nasional dan realitas pengelolaan keuangan rumah tangga di tingkat desa. Otoritas Jasa Keuangan mencatat dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2022 bahwa indeks literasi keuangan nasional berada pada 49,68 persen. Ketika angka itu dipilah berdasarkan lokasi, masyarakat perdesaan hanya mencapai 43,32 persen, perempuan 47,02 persen dan kelompok petani serta buruh tani turun lebih jauh ke 37,91 persen (OJK, 2022). Tiga segmen populasi ini bertumpang tindih secara demografis di Desa Parangargo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Kondisi itu menempatkan desa ini sebagai lokus di mana kerentanan finansial masyarakat terkonsentrasi secara kumulatif dan belum tertangani secara sistematis.

Literasi keuangan dalam kerangka akademik bukan sekadar kemampuan mengenal produk perbankan. Lusardi dan Mitchell (2014) mendefinisikannya sebagai kapasitas individu dalam memproses informasi ekonomi dan membuat keputusan yang tepat terkait perencanaan keuangan, akumulasi aset dan pengelolaan kewajiban finansial. Definisi ini menempatkan literasi keuangan sebagai kompetensi kognitif dan perilaku sekaligus. Artinya, seseorang bisa saja tahu bahwa menabung itu menguntungkan, tetapi tetap tidak mampu melakukannya karena tidak memiliki kerangka praktis untuk mengalokasikan pendapatan secara terencana. Kesenjangan antara pengetahuan dan tindakan inilah yang paling sering dijumpai di komunitas perdesaan seperti Desa Parangargo, di mana perempuan dalam rumah tangga mengelola keuangan keluarga secara intuitif tanpa catatan dan tanpa rencana.

Akses terhadap layanan keuangan formal di Indonesia memang meningkat pasca-pandemi COVID-19, namun peningkatan akses tidak otomatis berbanding lurus dengan peningkatan kapasitas penggunaan. World Bank dalam *Global Findex Database 2021* menegaskan bahwa jurang antara kepemilikan rekening bank dan penggunaan aktifnya masih lebar khususnya di kalangan perempuan berpenghasilan rendah di wilayah non-perkotaan (Demirgüç-Kunt et al., 2022). Fakta ini membongkar asumsi kebijakan yang selama ini bekerja, bahwa memperluas infrastruktur akses sudah cukup, ternyata tidak. Masyarakat yang sudah memiliki rekening pun kerap tidak menggunakannya untuk menabung secara terencana karena mereka tidak memiliki pemahaman tentang cara kerja bunga, cara memilih produk simpanan yang sesuai kapasitas atau cara menghitung manfaat jangka panjang dari keputusan finansial sederhana.

Kegagalan sistem keuangan formal menjangkau masyarakat desa secara substantif menciptakan ruang yang diisi oleh praktik pinjaman informal berbunga tinggi. Data Susenas 2023 dari Badan Pusat Statistik mencatat bahwa sebagian besar rumah tangga

perdesaan yang meminjam uang masih bergantung pada sumber informal termasuk perorangan yang meminjamkan dengan bunga di luar batas kewajaran (BPS, 2023). Di lapangan, bunga pinjaman dari rentenir lazim berada di kisaran 10 hingga 30 persen per bulan. Dalam skema seperti itu, utang pokok senilai satu juta rupiah dapat berkembang menjadi beban dua juta rupiah hanya dalam tempo tiga hingga empat bulan. Masyarakat tidak selalu memilih jalur ini karena tidak ada pilihan lain. Mereka memilihnya karena prosesnya cepat, tidak memerlukan dokumen dan tidak menimbulkan rasa enggan yang sama seperti ketika berhadapan dengan birokrasi perbankan formal. Dimensi psikologis dan sosial dari kemiskinan keuangan ini jarang menjadi pertimbangan dalam desain program inklusi keuangan pemerintah.

Beegle et al. (2016) dalam kajian kemiskinan global yang diterbitkan World Bank menunjukkan bahwa ketidakpastian pendapatan yang tidak disertai mekanisme penyangga finansial mendorong rumah tangga miskin ke dalam siklus utang yang melemahkan kapasitas ekonomi jangka panjang, Siklus itu bekerja secara halus. Ketika pendapatan tidak tercatat maka pengeluaran tidak terpantau. Ketika pengeluaran tidak terpantau maka tabungan tidak terbentuk. Ketika tabungan tidak ada maka guncangan ekonomi sekecil apapun seperti sakit satu anggota keluarga atau biaya sekolah anak langsung mendorong keputusan meminjam. Dalam konteks Desa Parangargo yang didominasi petani musiman dan pedagang kecil, pola ini bukan pengecualian, ia adalah norma yang diam-diam menggerus ketahanan ekonomi keluarga dari dalam.

Perempuan memegang posisi sentral dalam dinamika keuangan rumah tangga desa namun secara historis paling sedikit mendapatkan akses terhadap edukasi finansial formal. Swamy et al. (2001) menemukan bahwa perempuan yang memiliki kendali atas keputusan keuangan rumah tangga cenderung mengalokasikan sumber daya lebih efisien untuk kebutuhan dasar keluarga khususnya kesehatan dan pendidikan anak. Temuan ini memberi implikasi kebijakan yang konkret. Kelompok PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dan anggota Posyandu di Desa Parangargo adalah agregat dari perempuan-perempuan dengan posisi strategis tersebut. Intervensi literasi keuangan yang menyasar mereka bukan sekadar program sosial yang bersifat karitatif, melainkan instrumen pembangunan yang bekerja pada level modal manusia lintas generasi.

Xu dan Zia (2012) dalam kajian Bank Dunia tentang program literasi keuangan di berbagai negara berkembang menegaskan bahwa pelatihan langsung berbasis komunitas menghasilkan perubahan perilaku keuangan yang lebih bertahan lama dibandingkan kampanye media satu arah. Perbedaannya bukan hanya soal metode penyampaian, melainkan soal konteks pembelajaran. Ketika seorang ibu rumah tangga di desa belajar mencatat pengeluaran dalam forum bersama tetangganya menggunakan bahasa dan contoh yang relevan dengan kehidupan nyata mereka, proses itu menciptakan resonansi yang tidak bisa direplikasi oleh brosur atau siaran radio. Pendekatan partisipatif berbasis komunitas inilah yang menjadi fondasi metodologis program pelatihan di Desa Parangargo.

Garman dan Fogue (2011) merumuskan empat kompetensi dasar manajemen keuangan personal yang relevan untuk konteks rumah tangga perdesaan yaitu kemampuan mencatat arus kas, kemampuan menyusun anggaran rumah tangga, pemahaman tentang instrumen simpanan dan proteksi risiko serta kemampuan mengevaluasi keputusan kredit secara rasional. Kerangka ini menjadi peta jalan desain kurikulum pelatihan di Desa Parangargo yang mencakup pembukuan sederhana pendapatan dan pengeluaran, perencanaan keuangan jangka pendek dan panjang,

pengenalan instrumen tabungan dan asuransi mikro serta strategi menghindari pinjaman berbunga tinggi. Keempat modul itu bukan rangkaian ceramah teoritis. Ia dirancang sebagai proses pembelajaran praktis yang membawa perubahan konkret dalam perilaku finansial peserta.

Regulasi nasional sesungguhnya telah menyediakan landasan kebijakan yang mendukung intervensi semacam ini. Peraturan OJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan mengamanatkan kontribusi aktif seluruh pelaku jasa keuangan dalam program edukasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas sebagai bagian integral dari agenda pembangunan desa. Namun jarak antara amanat regulasi dan implementasi di lapangan masih terasa nyata. Program pemerintah yang ada cenderung bekerja secara top-down dan tidak selalu menyentuh kebutuhan teknis masyarakat dalam mengelola keuangan sehari-hari. Kelompok PKK dan Posyandu yang seharusnya menjadi jalur strategis penyampaian edukasi keuangan justru belum dimanfaatkan secara optimal untuk tujuan tersebut.

Atkinson dan Messy (2012) dalam kerangka Financial Education OECD menegaskan bahwa perubahan perilaku keuangan membutuhkan kombinasi tiga elemen secara simultan yaitu pengetahuan, sikap positif terhadap perencanaan finansial dan praktik nyata yang diulang dalam konteks kehidupan sehari-hari. Tanpa elemen ketiga, pelatihan keuangan hanya bekerja di permukaan dan tidak menghasilkan perubahan yang dapat diukur. Program pengabdian masyarakat di Desa Parangargo ini berangkat dari pemahaman itu. Ia tidak datang dengan asumsi bahwa masyarakat perlu diajarkan dari nol. Ia datang dengan keyakinan bahwa masyarakat memiliki kapasitas untuk berubah ketika mereka mendapat pengetahuan yang tepat dalam format yang relevan dengan realitas keuangan mereka.

Tabel 1.

Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Berdasarkan Kategori Wilayah dan Kelompok di Indonesia Tahun 2022

Kategori	Indeks Literasi Keuangan (%)	Indeks Inklusi Keuangan (%)
Nasional	49,68	85,10
Perkotaan	55,77	88,12
Perdesaan	43,32	82,22
Perempuan	47,02	83,88
Petani dan Buruh Tani	37,91	79,44

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022*.

Tabel di atas memperlihatkan pola kesenjangan yang konsisten. Kelompok perdesaan, perempuan dan petani secara bersamaan berada di bawah rata-rata nasional baik dari sisi literasi maupun inklusi keuangan. Desa Parangargo dengan komposisi demografis yang didominasi ibu rumah tangga berlatar belakang pertanian dan perdagangan kecil merepresentasikan titik pertemuan dari ketiga kerentanan tersebut. Program pelatihan literasi keuangan yang dirancang untuk komunitas ini bukan respons sporadis terhadap masalah permukaan, melainkan intervensi terstruktur terhadap defisit kapasitas finansial yang telah berlangsung lama dan berdampak langsung pada ketahanan ekonomi keluarga di tingkat desa.

KAJIAN TEORITIS

1. Konsep dan Definisi Literasi Keuangan

Literasi keuangan sebagai konstruk akademik telah mengalami evolusi definitif yang cukup signifikan sejak dekade 1990-an hingga memasuki era pascapandemi. Lusardi dan Mitchell (2014) merumuskan literasi keuangan sebagai kapasitas individu dalam memproses informasi ekonomi dan membuat keputusan yang tepat dalam konteks perencanaan keuangan, akumulasi kekayaan, pengelolaan utang dan penilaian risiko finansial. Rumusan ini melampaui pengertian sempit tentang kemampuan berhitung atau mengenal produk bank. Ia menyentuh dimensi perilaku dan kognitif yang menentukan apakah seseorang mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, antara pinjaman produktif dan pinjaman konsumtif, antara risiko yang dapat dikelola dan risiko yang menghancurkan.

OECD melalui jaringan *International Network on Financial Education* merumuskan literasi keuangan sebagai kombinasi kesadaran, pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan yang tepat dan mencapai kesejahteraan finansial individu (Atkinson & Messy, 2012). Definisi OECD ini lebih operasional karena mengidentifikasi lima dimensi yang dapat diukur secara empiris. Dalam konteks komunitas perdesaan seperti Desa Parangargo, dimensi sikap dan perilaku justru menjadi titik kritis. Pengetahuan tentang tabungan bisa disampaikan dalam satu sesi ceramah. Tetapi mengubah kebiasaan menyimpan uang di bawah kasur menjadi kebiasaan menabung di lembaga keuangan formal membutuhkan intervensi yang jauh lebih berlapis.

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

2. Manajemen Keuangan Rumah Tangga dan Kerangka Kompetensi Dasar

Manajemen keuangan rumah tangga merupakan cabang dari manajemen keuangan personal yang secara spesifik membahas pengalokasian sumber daya finansial dalam unit keluarga. Garman dan Fogue (2011) mengidentifikasi empat kompetensi dasar yang harus dikuasai setiap kepala rumah tangga yaitu pencatatan arus kas, penyusunan anggaran, pemilihan instrumen simpanan dan proteksi risiko serta evaluasi keputusan kredit. Keempat kompetensi ini membentuk satu siklus yang saling bergantung. Tanpa pencatatan arus kas yang tertib maka penyusunan anggaran tidak memiliki basis data yang akurat. Tanpa anggaran yang terencana maka alokasi untuk tabungan dan asuransi tidak terbentuk. Ketika tidak ada tabungan maka setiap guncangan ekonomi mendorong keputusan kredit yang reaktif dan berisiko.

Kerangka Garman dan Fogue relevan secara langsung dengan desain program pelatihan di Desa Parangargo. Modul pembukuan sederhana pendapatan dan pengeluaran menyasar kompetensi pertama. Modul perencanaan keuangan jangka pendek dan panjang menyasar kompetensi kedua. Pengenalan instrumen tabungan dan asuransi mikro mengisi kompetensi ketiga. Strategi menghindari rentenir dan pinjaman berbunga tinggi secara langsung membangun kompetensi keempat. Struktur ini bukan kebetulan. Ia mencerminkan desain berbasis teori yang memastikan setiap sesi pelatihan berkontribusi pada pembentukan kapasitas finansial yang utuh dan saling menopang.

3. Perilaku Keuangan dan Teori Pengambilan Keputusan Finansial

Teori perilaku keuangan (*behavioral finance*) memberikan lensa analitis yang lebih realistis untuk memahami mengapa masyarakat berpenghasilan rendah sering membuat keputusan finansial yang tampak irasional dari perspektif ekonomi klasik. Thaler dan

Sunstein (2009) dalam kerangka nudge theory menunjukkan bahwa keputusan keuangan manusia sangat dipengaruhi oleh arsitektur pilihan dan konteks sosial di sekitarnya. Artinya, masyarakat desa yang memilih meminjam kepada rentenir bukan semata-mata karena tidak tahu risiko bunga tinggi, melainkan karena arsitektur pilihan yang tersedia di sekitar mereka memang tidak memberi alternatif yang cukup mudah dan cepat diakses. Rentenir hadir dengan kecepatan dan kesederhanaan yang tidak bisa ditandingi oleh prosedur pengajuan kredit di lembaga keuangan formal.

Mullainathan, et al. (2013) mengembangkan argumen yang lebih dalam. Mereka menunjukkan bahwa kondisi kelangkaan sumber daya baik uang maupun waktu menghasilkan tekanan kognitif yang mempersempit kapasitas berpikir jangka panjang. Individu yang menghadapi tekanan finansial akut cenderung membuat keputusan yang mengutamakan kebutuhan mendesak hari ini dengan mengorbankan kepentingan masa depan. Dalam realitas Desa Parangargo, ini berarti seorang ibu yang kesulitan membayar biaya rawat inap anaknya tidak sedang membuat keputusan yang tidak rasional ketika ia meminjam dari rentenir. Ia sedang merespons tekanan kognitif kelangkaan dengan satu-satunya opsi yang tersedia secara instan. Pemahaman ini mengubah cara kita merancang intervensi, dari yang sebelumnya berfokus pada "memberitahu" menuju yang berfokus pada "memperluas pilihan nyata yang dapat diakses."

4. Literasi Keuangan, Gender dan Pemberdayaan Perempuan Desa

Relasi antara literasi keuangan dan pemberdayaan perempuan telah didokumentasikan dalam berbagai studi empiris lintas negara. Doss (2013) dalam kajiannya tentang aset perempuan dan kesejahteraan rumah tangga yang diterbitkan World Bank menunjukkan bahwa perempuan yang memiliki kontrol atas aset dan keputusan keuangan rumah tangga menghasilkan investasi lebih besar pada kesehatan dan pendidikan anak dibandingkan rumah tangga di mana kontrol keuangan didominasi laki-laki. Temuan ini melampaui sekadar argumen kesetaraan gender. Ia berbicara tentang efisiensi alokasi sumber daya dalam unit keluarga sebagai unit pembangunan terkecil.

Swamy et al. (2001) memperkuat argumen ini dengan menemukan korelasi antara keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan kualitas tata kelola sumber daya di tingkat komunitas. Di Desa Parangargo, kelompok PKK dan Posyandu bukan sekadar wadah sosial dan kesehatan. Mereka adalah struktur komunitas yang sudah memiliki jaringan kepercayaan, rutinitas pertemuan dan mekanisme koordinasi yang berfungsi. Mengintegrasikan edukasi keuangan ke dalam struktur yang sudah ada ini jauh lebih efektif daripada membangun forum baru dari nol. Penelitian Kabeer (2005) tentang pemberdayaan perempuan dan pengentasan kemiskinan di Asia Selatan menemukan bahwa intervensi keuangan yang memanfaatkan jaringan sosial perempuan yang sudah terbentuk menghasilkan efek penyebaran pengetahuan (*knowledge spillover*) yang signifikan ke anggota komunitas yang tidak langsung mengikuti pelatihan.

5. Inklusi Keuangan sebagai Kebijakan Publik dan Batasannya

Inklusi keuangan telah menjadi agenda kebijakan publik global yang menguat sejak G20 Pittsburgh Summit tahun 2009 menetapkan *Financial Inclusion* sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi inklusif. Di Indonesia kebijakan ini diformalisasi melalui Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016. Target utamanya adalah memastikan 90 persen penduduk dewasa memiliki akses terhadap layanan keuangan formal pada tahun 2024. Data OJK (2022) menunjukkan bahwa indeks inklusi keuangan nasional telah mencapai 85,10 persen, sebuah pencapaian yang secara numerik menggembirakan namun menyimpan kompleksitas yang sering diabaikan oleh pembuat kebijakan.

Demirguc-Kunt et al. (2022) membedakan secara tegas antara *access to finance* dan *use of finance*. Seseorang bisa memiliki rekening bank tetapi tidak pernah menggunakannya untuk menabung secara terencana, tidak pernah mengakses kredit formal dan tidak pernah membeli produk proteksi risiko. Ini adalah fenomena yang disebut *shallow inclusion*, yaitu inklusi yang berhenti di level kepemilikan akun tanpa bergerak ke level utilisasi aktif. Fenomena ini sangat nyata di desa-desa seperti Parangargo di mana program Simpanan Keluarga Sejahtera atau pembukaan rekening massal melalui berbagai program pemerintah belum diikuti dengan edukasi tentang cara memanfaatkan rekening tersebut secara terencana dan produktif.

6. Efektivitas Program Pelatihan Keuangan Berbasis Komunitas

Debat tentang efektivitas program literasi keuangan cukup sengit di kalangan peneliti. Meta-analisis yang dilakukan Fernandes et al. (2014) terhadap 168 studi menemukan bahwa intervensi literasi keuangan secara rata-rata hanya menjelaskan 0,1 persen variasi dalam perilaku keuangan peserta. Temuan ini tampak mengecewakan namun menyimpan catatan metodologis yang penting. Sebagian besar studi yang masuk dalam meta-analisis itu mengukur dampak dalam jangka pendek segera setelah intervensi tanpa mengontrol kualitas desain pelatihan atau relevansi kontekstualnya.

Xu dan Zia (2012) memberikan nuansa yang lebih kaya. Mereka menemukan bahwa program pelatihan yang dirancang dengan mempertimbangkan konteks budaya lokal, menggunakan bahasa dan contoh yang relevan dengan kehidupan peserta serta melibatkan praktik langsung dalam sesi pelatihan menghasilkan perubahan perilaku yang jauh lebih terukur. Studi kasus di Kenya melalui program *Financial Education for the Poor* yang dijalankan *Freedom from Hunger* menunjukkan bahwa peserta yang menerima pelatihan keuangan berbasis kelompok mengalami peningkatan tabungan sebesar 24 persen dalam enam bulan pasca-pelatihan dibandingkan kelompok kontrol (Xu & Zia, 2012). Angka itu bukan keajaiban. Ia adalah hasil dari desain pelatihan yang kontekstual, literatif dan memberikan peserta alat praktis yang langsung bisa mereka gunakan keesokan harinya.

7. Pembukuan Sederhana sebagai Praktik Akuntansi Komunitas

Pembukuan sederhana di tingkat rumah tangga merupakan aplikasi prinsip akuntansi dasar dalam skala mikro yang sering diabaikan dalam kurikulum edukasi keuangan. Padahal pencatatan arus kas harian adalah fondasi dari seluruh keputusan keuangan yang baik. Warren dan Tyagi (2006) merumuskan prinsip alokasi pendapatan rumah tangga yang membagi arus kas ke dalam tiga kategori yaitu kebutuhan pokok sebesar 50 persen, tabungan dan pembayaran utang sebesar 20 persen serta pengeluaran personal sebesar 30 persen. Formula ini dikenal sebagai *50/20/30 rule* dan telah divalidasi dalam berbagai konteks termasuk rumah tangga berpenghasilan rendah di negara berkembang.

Dalam konteks Desa Parangargo, penerapan prinsip ini perlu disesuaikan dengan karakteristik pendapatan yang tidak tetap dan musiman. Petani yang menerima pendapatan besar saat panen tetapi nyaris tidak memiliki pemasukan di luar musim panen memerlukan strategi pembukuan yang memperhitungkan fluktuasi arus kas secara musiman. Pelatihan pembukuan sederhana di Desa Parangargo tidak hanya mengajarkan cara mencatat pemasukan dan pengeluaran harian. Ia dirancang untuk membantu peserta memahami pola arus kas mereka sendiri dan mengidentifikasi celah di mana kebocoran pengeluaran terjadi tanpa disadari.

Tabel 2.

Kerangka Teoretis dan Relevansinya terhadap Desain Program Pelatihan Literasi Keuangan di
Desa Parangargo

Teori/Konsep	Sumber	Relevansi terhadap Program
--------------	--------	----------------------------

Definisi Literasi Keuangan	Lusardi & Mitchell (2014)	Dasar konseptual kompetensi yang dilatihkan
Kompetensi Manajemen Keuangan Personal	Garman & Fogue (2011)	Kerangka desain empat modul pelatihan
Nudge Theory dan Arsitektur Pilihan	Thaler & Sunstein (2008)	Strategi mengurangi ketergantungan pada rentenir
Scarcity dan Tekanan Kognitif	Mullainathan & Shafir (2013)	Memahami perilaku pinjaman impulsif
Pemberdayaan Perempuan dan Alokasi Sumber Daya	Swamy et al. (2001); Doss (2013)	Justifikasi penargetan PKK dan Posyandu
Pelatihan Keuangan Berbasis Komunitas	Xu & Zia (2012)	Fondasi metodologis pendekatan partisipatif
Shallow Inclusion dan Batas Inklusi Keuangan	Demirgüç-Kunt et al. (2022)	Kritik terhadap program akses tanpa edukasi
Alokasi Arus Kas Rumah Tangga	Warren & Tyagi (2005)	Prinsip pembukuan dan perencanaan anggaran

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Tabel di atas memperlihatkan bahwa program pelatihan di Desa Parangargo bukan intervensi yang didesain secara intuitif. Setiap modul yang dijalankan memiliki pijakan teoretis yang dapat dipertanggungjawabkan dan telah diuji dalam berbagai konteks penelitian. Kerangka ini juga menegaskan bahwa efektivitas program bukan hanya soal apa yang diajarkan, melainkan soal bagaimana pengetahuan itu disampaikan dalam konteks yang relevan dengan kehidupan nyata peserta.

METODE PENELITIAN

Desain metodologis program ini dibangun atas paradigma partisipatif-transformatif yang menempatkan peserta sebagai aktor aktif dalam proses pembelajaran keuangan rumah tangga. Pendekatan ini berpijak pada teori pembelajaran orang dewasa (andragogy) dari Knowles (1984) yang menekankan bahwa pembelajaran efektif terjadi ketika materi terhubung langsung dengan pengalaman hidup peserta dan dapat diaplikasikan segera dalam konteks nyata mereka. Freire (2021) menegaskan bahwa pendidikan yang membebaskan harus dimulai dari realitas konkret yang dialami peserta bukan dari abstraksi konsep yang asing bagi mereka. Program dilaksanakan di Desa Parangargo dengan target 40 orang anggota aktif PKK dan kader Posyandu yang dipilih berdasarkan konvergensi tiga kategori kerentanan literasi keuangan menurut data OJK (2022) yaitu wilayah perdesaan dengan indeks 43,32 persen, perempuan 47,02 persen dan petani serta buruh tani 37,91 persen. Pemanfaatan struktur komunitas yang sudah berfungsi ini jauh lebih efisien dibanding membangun kelompok baru yang membutuhkan waktu lama untuk membangun kohesivitas internal (Putnam, 2000).

Pelaksanaan program disusun dalam empat fase berurutan yang saling terkait secara logis. Fase pertama adalah penilaian kebutuhan (*needs assessment*) melalui wawancara mendalam dengan 15 calon peserta untuk menggali praktik pengelolaan keuangan eksisting, pola pengeluaran dan hambatan dalam menabung atau menghindari utang

sesuai prinsip contextual learning (Johnson, 2002). Fase kedua adalah pelaksanaan pelatihan dalam empat sesi dengan interval satu minggu antarsesi dan rasio ceramah interaktif terhadap aktivitas partisipatif 30:70 sesuai rekomendasi Mezirow (2015) tentang transformative learning. Sesi pertama membahas pembukuan sederhana dengan template buku kas harian yang disesuaikan untuk kondisi pendapatan tidak tetap. Sesi kedua membahas perencanaan keuangan menggunakan studi kasus nyata dan prinsip 50/20/30 rule dari Warren dan Tyagi (2006) yang diadaptasi untuk konteks desa. Sesi ketiga memperkenalkan instrumen tabungan dan asuransi mikro dengan mengundang langsung praktisi dari lembaga keuangan untuk mengurangi jarak psikologis antara masyarakat desa dan lembaga keuangan formal. Sesi keempat membahas strategi menghindari rentenir melalui simulasi perhitungan bunga yang membandingkan pinjaman informal berbunga 20 persen per bulan dengan kredit formal berbunga 1 persen per bulan untuk memberikan landasan rasional bagi peserta.

Fase ketiga adalah pendampingan pasca-pelatihan selama empat minggu melalui kunjungan rumah dan pertemuan kelompok kecil yang difasilitasi mahasiswa pendamping terlatih untuk memberikan dukungan teknis dan ruang refleksi yang menciptakan pembelajaran sosial (*social learning*) sesuai teori Bandura dan Walters (1977). Fase keempat adalah evaluasi dampak menggunakan metode *mixed-methods* yang menggabungkan data kuantitatif dari kuesioner terstruktur yang mengukur lima indikator yaitu frekuensi pencatatan keuangan, pembuatan anggaran bulanan, jumlah tabungan yang disisihkan, penggunaan layanan keuangan formal dan penurunan ketergantungan pada pinjaman informal, serta data kualitatif dari *focus group discussion* (FGD) dengan 12 peserta untuk menggali persepsi mereka terhadap manfaat pelatihan dan hambatan yang masih dihadapi (Creswell & Clark, 2017). Seluruh rangkaian kegiatan didokumentasikan secara sistematis melalui foto, video testimoni, notulensi diskusi dan catatan lapangan berdasarkan prinsip *reflective practice* dari Schon dan DeSanctis (1986) untuk menjadi bahan refleksi tim dalam memperbaiki desain program di masa mendatang dengan fleksibilitas metodologis yang memungkinkan penyesuaian responsif terhadap dinamika lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Program pelatihan literasi keuangan di Desa Parangargo menghasilkan perubahan perilaku finansial yang terukur pada tingkat rumah tangga meskipun dengan intensitas dan kecepatan yang tidak seragam antar individu peserta. Data kuantitatif dari kuesioner terstruktur yang diberikan kepada 40 peserta enam minggu pasca-pelatihan menunjukkan bahwa 82,5 persen peserta atau 33 orang telah mulai mencatat pendapatan dan pengeluaran harian secara rutin menggunakan template buku kas yang diberikan selama pelatihan. Angka ini melampaui proyeksi awal tim yang memperkirakan tingkat adopsi praktik pembukuan hanya di kisaran 60 persen mengingat mayoritas peserta memiliki latar pendidikan formal SD hingga SMP. Temuan ini mengonfirmasi argumen Xu dan Zia (2012) bahwa pelatihan keuangan yang dirancang kontekstual dengan menggunakan bahasa sederhana dan contoh relevan dari kehidupan sehari-hari peserta menghasilkan perubahan perilaku yang lebih terukur dibandingkan intervensi berbasis materi generik yang tidak menyentuh realitas keuangan mereka.
- B. Ketika peserta mulai mencatat pengeluaran harian mereka menemukan pola kebocoran keuangan yang selama ini tidak disadari. Seorang peserta bernama Ibu Suryani yang bekerja sebagai pedagang sayur di pasar melaporkan bahwa ia baru

menyadari pengeluaran untuk jajan anak sebesar Rp 10.000 per hari terakumulasi menjadi Rp 300.000 per bulan ketika ia melihat catatan bulanannya. Angka itu setara dengan 15 persen dari total pendapatan bulanannya yang berkisar Rp 2.000.000. Kesadaran kuantitatif semacam ini tidak muncul dari ceramah tentang pentingnya menabung melainkan dari proses refleksi terhadap data pengeluaran aktual yang peserta catat sendiri. Ini sejalan dengan prinsip *transformative learning* dari Mezirow (2015) bahwa perubahan perilaku orang dewasa dimulai dari pengalaman disorientasi ketika mereka menyadari bahwa asumsi lama mereka tentang pengelolaan keuangan ternyata tidak efektif. Pencatatan keuangan berfungsi sebagai cermin yang memaksa peserta melihat realitas finansial mereka secara objektif dan membuat keputusan perbaikan berdasarkan fakta bukan perasaan.

- C. Namun data kualitatif dari *focus group discussion* (FGD) dengan 12 peserta mengungkap hambatan yang tidak tertangkap oleh angka statistik. Beberapa peserta menghadapi resistensi dari pasangan atau anggota keluarga lain yang menganggap pencatatan keuangan sebagai bentuk kontrol berlebihan atau ketidakpercayaan terhadap pengelolaan uang dalam rumah tangga. Seorang peserta yang berusia 43 tahun menceritakan bahwa suaminya merasa tersinggung ketika ia mulai menanyakan detail pengeluaran harian untuk dicatat dalam buku kas. Kasus ini menegaskan temuan Kabeer (2005) bahwa intervensi keuangan pada perempuan tidak dapat dipisahkan dari konteks relasi kuasa dalam rumah tangga. Literasi keuangan bukan sekadar kompetensi teknis melainkan juga proses negosiasi sosial yang memerlukan dukungan dari seluruh anggota keluarga terutama dalam konteks budaya Jawa di mana keputusan keuangan sering kali masih dipengaruhi oleh hierarki gender.
- D. Tim pendamping merespons fenomena ini dengan mengadakan sesi tambahan yang melibatkan beberapa pasangan dari peserta untuk menjelaskan bahwa pembukuan bukan bentuk kontrol melainkan alat transparansi yang menguntungkan seluruh keluarga dalam membuat keputusan finansial yang lebih baik. Pendekatan ini terbukti efektif karena tiga dari lima pasangan yang awalnya resisten mulai mendukung istri mereka mencatat keuangan bahkan ikut memberikan informasi pengeluaran mereka secara sukarela. Ini menunjukkan bahwa program literasi keuangan yang efektif harus mempertimbangkan dimensi relasional dan budaya bukan hanya dimensi individual-kognitif yang sering menjadi fokus tunggal desain program pemerintah.
- E. Dalam aspek perencanaan keuangan jangka pendek dan panjang, 67,5 persen peserta atau 27 orang melaporkan telah menyusun anggaran bulanan sederhana meskipun tidak semua berhasil konsisten mengikutinya. Mayoritas peserta mengadaptasi prinsip 50/20/30 rule dari Warren dan Tyagi (2006) dengan memodifikasi alokasi tabungan dari 20 persen menjadi 10 persen karena merasa pendapatan mereka belum cukup untuk menyisihkan porsi lebih besar. Modifikasi ini bukan kegagalan melainkan bukti bahwa peserta telah menginternalisasi prinsip perencanaan keuangan dan menyesuaikannya dengan kapasitas finansial mereka sendiri. Seorang peserta yang bekerja sebagai pedagang sayur mengaku bahwa ia mulai memisahkan uang hasil jualan harian ke dalam tiga amplop berbeda yaitu untuk belanja dapur, tabungan dan pengeluaran fleksibel seperti arisan atau keperluan sosial.
- F. Metode amplop ini ternyata lebih intuitif bagi peserta dengan literasi formal rendah dibanding spreadsheet digital yang awalnya ditawarkan tim pelaksana. Peserta lain bahkan mengembangkan inovasi sendiri dengan menggunakan kaleng bekas susu untuk menyimpan uang tabungan yang diberi label sesuai tujuan seperti "biaya sekolah anak" atau "dana darurat kesehatan". Kreativitas lokal semacam ini

menegaskan argumen Freire (2021) bahwa pendidikan yang membebaskan tidak memaksakan solusi dari luar melainkan memfasilitasi peserta menemukan cara mereka sendiri dalam menerapkan prinsip yang telah dipelajari. Tim pendamping tidak mengkoreksi metode amplop atau kaleng bekas sebagai bentuk primitif dari perencanaan keuangan melainkan mengapresiasi dan mendokumentasikannya sebagai *best practice* yang dapat dibagikan ke peserta lain.

- G. Perubahan paling dramatis terjadi pada aspek akses terhadap layanan keuangan formal dan penurunan ketergantungan pada pinjaman informal berbunga tinggi. Data menunjukkan bahwa 22 peserta atau 55 persen membuka rekening tabungan baru di lembaga keuangan terdekat dalam periode enam minggu pasca-pelatihan. Angka ini signifikan mengingat sebelum pelatihan hanya 12 peserta atau 30 persen yang memiliki rekening aktif di lembaga keuangan formal. Lebih menggembarakan lagi adalah fakta bahwa dari 22 peserta yang membuka rekening baru, 18 orang atau 81,8 persen telah melakukan setoran tabungan secara rutin minimal dua kali dalam periode evaluasi dengan nominal berkisar antara Rp 20.000 hingga Rp 100.000 per setoran. Ini bukan sekadar *shallow inclusion* yang dikritik Demircuc-Kunt et al. (2022) melainkan utilisasi aktif dari layanan keuangan formal yang menandakan perubahan perilaku substantif.
- H. Kehadiran langsung praktisi dari lembaga keuangan dalam sesi pelatihan ketiga terbukti efektif mengurangi jarak psikologis antara masyarakat desa dan lembaga keuangan formal. Beberapa peserta mengaku bahwa mereka selama ini merasa takut dan malu masuk ke kantor bank karena merasa tidak paham prosedurnya dan khawatir dilecehkan karena penampilan mereka yang sederhana. Sesi dialogis dengan praktisi perbankan yang menjelaskan prosedur pembukaan rekening dengan bahasa lugas dan tanpa jargon teknis memberikan rasa percaya diri bagi peserta bahwa mereka juga berhak mengakses layanan keuangan formal tanpa harus merasa rendah diri. Seorang peserta bahkan mengatakan bahwa ia merasa "dihargai sebagai nasabah" ketika petugas lembaga keuangan terdekat menjelaskan bahwa setoran awal hanya Rp 10.000 dan tidak memerlukan dokumen rumit selain KTP.
- I. Aspek paling krusial dari program ini adalah penurunan ketergantungan pada rentenir dan pinjaman berbunga tinggi. Dari 40 peserta, 14 orang atau 35 persen mengaku pernah meminjam dari rentenir dalam enam bulan sebelum pelatihan dengan bunga berkisar 15 hingga 25 persen per bulan. Pada periode evaluasi enam minggu pasca-pelatihan hanya 3 peserta atau 7,5 persen yang melaporkan meminjam dari rentenir. Penurunan ini tidak dapat diinterpretasikan sepenuhnya sebagai dampak langsung pelatihan karena periode evaluasi yang relatif pendek dan kemungkinan peserta sedang tidak menghadapi guncangan ekonomi memaksa mereka meminjam. Namun data kualitatif dari FGD memberikan indikasi kuat bahwa peserta mulai mengembangkan mekanisme alternatif untuk menghadapi kebutuhan dana mendesak.
- J. Beberapa peserta melaporkan bahwa mereka membentuk arisan berantai dengan sistem tanggung renteng di mana setiap anggota berkontribusi Rp 50.000 per minggu dan setiap minggu satu anggota mendapat giliran menerima total dana yang terkumpul. Sistem ini memberikan akses dana cepat tanpa bunga meskipun memerlukan kepercayaan tinggi antaranggota. Ini adalah bentuk inovasi sosial yang muncul dari pembelajaran kolektif dalam pelatihan dan menegaskan argumen Bandura dan Walters (1977) tentang pembelajaran sosial (*social learning*) sebagai mekanisme difusi pengetahuan dalam komunitas. Peserta tidak hanya belajar dari fasilitator melainkan juga

saling belajar dari pengalaman dan strategi yang dikembangkan oleh sesama peserta dalam menghadapi tantangan keuangan mereka.

- K. Hambatan struktural yang teridentifikasi selama evaluasi mencakup keterbatasan akses internet untuk menggunakan layanan perbankan digital yang dipromosikan pemerintah dalam program inklusi keuangan nasional. Sebagian besar peserta tidak memiliki *smartphone* atau tidak memiliki literasi digital memadai untuk mengoperasikan aplikasi *mobile banking* meskipun mereka sudah memiliki rekening tabungan. Ini menggarisbawahi kesenjangan antara kebijakan inklusi keuangan yang semakin mengandalkan teknologi digital dan realitas kapasitas masyarakat desa yang masih bergantung pada layanan tatap muka di kantor cabang atau agen bank. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif perlu direvisi untuk mengakomodasi kebutuhan segmen populasi yang belum siap bertransisi ke ekosistem keuangan digital. Inklusivitas sejati bukan tentang memaksa masyarakat mengadopsi teknologi yang tidak mereka pahami melainkan tentang menyediakan beragam kanal akses yang dapat dipilih sesuai kapasitas masing-masing individu.
- L. Refleksi metodologis dari pelaksanaan program ini mengkonfirmasi pentingnya fleksibilitas dalam desain intervensi berbasis komunitas. Tim pelaksana beberapa kali harus menyesuaikan jadwal sesi pelatihan karena bentrok dengan kegiatan komunitas lain seperti pengajian atau rapat RT yang tidak dapat ditinggalkan peserta. Schon dan DeSanctis (1986) menyebut kapasitas ini sebagai *reflective practice* yaitu kemampuan praktisi untuk terus belajar dari proses pelaksanaan dan melakukan penyesuaian responsif terhadap dinamika lapangan. Keberhasilan program tidak ditentukan oleh kepatuhan rigid terhadap rencana awal melainkan oleh sensitivitas tim terhadap konteks sosial dan kemampuan beradaptasi tanpa mengorbankan substansi pembelajaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Program pelatihan literasi keuangan dan manajemen keuangan keluarga di Desa Parangargo membuktikan bahwa perubahan perilaku finansial masyarakat perdesaan dapat terjadi ketika intervensi dirancang secara kontekstual dan partisipatif dengan memanfaatkan struktur komunitas yang sudah ada. Data empiris menunjukkan bahwa 82,5 persen peserta mengadopsi praktik pencatatan keuangan harian, 67,5 persen menyusun anggaran bulanan sederhana dan 55 persen membuka rekening tabungan baru di lembaga keuangan formal dalam periode enam minggu pasca-pelatihan. Angka ini melampaui proyeksi awal dan mengonfirmasi argumen Xu dan Zia (2012) bahwa pelatihan berbasis komunitas yang menggunakan bahasa sederhana dan contoh relevan menghasilkan dampak lebih terukur dibanding kampanye media generik. Namun keberhasilan kuantitatif ini tidak menghilangkan kompleksitas hambatan struktural dan relasional yang dihadapi peserta terutama perempuan dalam konteks relasi kuasa rumah tangga yang masih dipengaruhi hierarki gender. Literasi keuangan terbukti bukan sekadar kompetensi teknis melainkan proses negosiasi sosial yang memerlukan dukungan dari seluruh anggota keluarga dan ekosistem kelembagaan yang lebih inklusif.

Temuan kritis dari program ini adalah kesenjangan antara kebijakan inklusi keuangan nasional yang semakin mengandalkan teknologi digital dan realitas kapasitas masyarakat desa yang masih bergantung pada layanan tatap muka. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif perlu direvisi untuk mengakomodasi keberagaman kanal akses yang dapat dipilih sesuai kapasitas masing-masing individu bukan memaksakan adopsi teknologi yang tidak mereka pahami. Fenomena *shallow inclusion* yang dikritik Demircuc-Kunt et al. (2022) di mana masyarakat memiliki rekening bank tetapi tidak menggunakannya secara aktif dapat diatasi hanya jika program akses disertai dengan edukasi berkelanjutan dan

pendampingan pasca-pelatihan yang intensif. Pengalaman Desa Parangargo menunjukkan bahwa kehadiran langsung praktisi perbankan dalam sesi pelatihan efektif mengurangi jarak psikologis antara masyarakat desa dan lembaga keuangan formal yang selama ini terasa asing dan menakutkan.

Rekomendasi kebijakan yang diajukan bersifat multi-level dan multi-stakeholder. Pada level nasional pemerintah melalui OJK dan Kementerian Desa PDTT perlu mengintegrasikan program literasi keuangan ke dalam struktur kelembagaan desa yang sudah ada seperti PKK dan Posyandu bukan membentuk kelompok baru yang memerlukan waktu lama untuk membangun kohesivitas. Peraturan OJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan perlu dilengkapi dengan panduan operasional yang spesifik untuk konteks perdesaan dengan mempertimbangkan karakteristik pendapatan musiman, literasi formal rendah dan dominasi relasi sosial informal dalam pengambilan keputusan finansial. Pada level daerah pemerintah kabupaten perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk pendampingan pasca-pelatihan yang berkelanjutan karena perubahan perilaku keuangan membutuhkan waktu dan repetisi praktik dalam konteks kehidupan sehari-hari sesuai prinsip Atkinson dan Messy (2012) bahwa literasi keuangan memerlukan kombinasi pengetahuan, sikap positif dan praktik nyata secara simultan.

Pada level komunitas kelompok PKK dan Posyandu perlu diberdayakan sebagai agen edukasi keuangan dengan memberikan mereka pelatihan khusus tentang metode pembelajaran partisipatif dan materi literasi keuangan yang kontekstual. Pengalaman Desa Parangargo menunjukkan bahwa inovasi lokal seperti metode amplop atau kaleng bekas untuk menyimpan uang tabungan yang diberi label sesuai tujuan adalah bentuk kreativitas yang perlu diapresiasi bukan dikoreksi sebagai primitif. Freire (2021) menegaskan bahwa pendidikan yang membebaskan tidak memaksakan solusi dari luar melainkan memfasilitasi peserta menemukan cara mereka sendiri dalam menerapkan prinsip yang telah dipelajari. Lembaga keuangan formal perlu mengadaptasi prosedur layanan mereka agar lebih ramah bagi segmen populasi berpendidikan rendah dengan menyederhanakan persyaratan dokumen, menyediakan petugas yang dapat menjelaskan produk dalam bahasa sederhana dan membuka kantor layanan di lokasi yang mudah diakses masyarakat desa.

Rekomendasi riset dan pelatihan lanjutan mencakup evaluasi dampak jangka panjang program literasi keuangan minimal 12 bulan pasca-pelatihan untuk mengukur persistensi perubahan perilaku dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan praktik keuangan yang telah dipelajari. Studi komparatif antarwilayah dengan karakteristik demografis berbeda perlu dilakukan untuk menguji generalisabilitas temuan dari Desa Parangargo dan mengidentifikasi model intervensi yang paling efektif untuk konteks spesifik. Penelitian tentang relasi kuasa gender dalam pengambilan keputusan keuangan rumah tangga perlu diperdalam mengingat temuan bahwa beberapa peserta menghadapi resistensi dari pasangan mereka ketika mulai mencatat keuangan. Kabeer (2005) mengingatkan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan tidak otomatis mengubah struktur relasi kuasa dalam rumah tangga tanpa disertai transformasi norma sosial yang lebih luas. Riset aksi partisipatif yang melibatkan seluruh anggota keluarga dalam proses pembelajaran keuangan dapat menjadi alternatif metodologis yang menjanjikan untuk mengatasi hambatan relasional ini.

DAFTAR REFERENSI

Atkinson, A., & Messy, F. A. (2012). Measuring financial literacy: Results of the OECD/International Network on Financial Education (INFE) pilot study.

- Badan Pusat Statistik. (2023). Survei sosial ekonomi nasional (Susenas) 2023. BPS. <https://www.bps.go.id>
- Bandura, A., & Walters, R. H. (1977). Social learning theory (Vol. 1, pp. 141-154). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-hall.
- Beegle, K., Christiaensen, L., Dabalen, A., & Gaddis, I. (2016). Poverty in a rising Africa. World Bank Publications.
- Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2017). Designing and conducting mixed methods research. sage.
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Ansar, S. (2022). The Global Findex Database 2021: Financial inclusion, digital payments, and resilience in the age of COVID-19. World Bank Publications.
- Doss, C. (2013). Intrahousehold bargaining and resource allocation in developing countries. The World Bank Research Observer, 28(1), 52-78.
- Fernandes, D., Lynch Jr, J. G., & Netemeyer, R. G. (2014). Financial literacy, financial education, and downstream financial behaviors. Management science, 60(8), 1861-1883.
- Freire, P. (2021). Pedagogy of hope: Reliving pedagogy of the oppressed. Bloomsbury Publishing.
- Garman, E. T., & Forgue, R. E. (2011). Personal finance (11th ed.). South-Western Cengage Learning.
- Johnson, E. B. (2002). Contextual teaching and learning: What it is and why it's here to stay. Corwin Press.
- Kabeer, N. (2005). Gender equality and women's empowerment: A critical analysis of the third millennium development goal 1. Gender & development, 13(1), 13-24.
- Knowles, M. S. (1984). Andragogy in Action. Applying Modern Principles of Adult Education. San Francisco, CA: Jossey Bass.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. Journal of economic literature, 52(1), 5-44.
- Mezirow, J. (2015). Transformative learning. Challenging educational theories, 319.
- Mullainathan, S., Shafir, E., & Shafir, E. (2013). Scarcity: Why having too little means so much. Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan/atau masyarakat. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Survei nasional literasi dan inklusi keuangan (SNLIK) 2022. OJK. <https://www.ojk.go.id>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
- Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. Simon & Schuster.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sekretariat Negara.
- Schon, D. A., & DeSanctis, V. (1986). The reflective practitioner: How professionals think in action.
- Swamy, A., Knack, S., Lee, Y., & Azfar, O. (2001). Gender and corruption. Journal of development economics, 64(1), 25-55.
- Thaler, R. H., Sunstein, C. R., & Milligan, S. (2009). Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness (Vol. 47, p. 9). London: Penguin books.
- Warren, E., & Tyagi, A. W. (2006). All your worth: The ultimate lifetime money plan. Simon and Schuster.
- Xu, L., & Zia, B. (2012). Financial literacy around the world: an overview of the evidence with practical suggestions for the way forward. World Bank Policy Research Working Paper, (6107).